

# PEMBERITAAN EFISIENSI ANGGARAN MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) ERA PRABOWO: ANALISIS FRAMING DI MEDIA DARING TEMPO.CO PADA FEBRUARI 2025

Arifatul Amalia \*<sup>1</sup>

Yudino <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Sains Al-Qur'an

\*e-mail: arftl333amalia@gmail.com<sup>1</sup>, Yudinomaskuri@gmail.com <sup>2</sup>,

## Abstrak

Arifatul Amalia, 2022050028, 2025. Pemberitaan Efisiensi Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) Era Prabowo: Analisis Framing di Media Daring Tempo.co pada Februari 2025. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo. Menyebarnya kabar adanya efisiensi anggaran guna menunjang program unggulan Presiden Prabowo menjadi perbincangan Masyarakat Indonesia sejak Januari 2025. Bagi media, topik ini dapat dijadikan sebagai bahan berita yang bagus dan dapat dikonsumsi public dalam waktu yang berdekatan. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji bagaimana pembingkai berita atau frame yang digunakan di media Tempo.co sebagai Perusahaan media yang besar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memakai pisau analisis framing model Robert N. Entman. Metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan 10 berita mengenai efisiensi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pemberitaan Tempo.co. Analisis ini dilakukan dengan empat alat ukur berupa problem identification, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment recommendation. Hasil penelitian menyimpulkan dilihat dari keempat elemen tersebut, Tempo.co cenderung memperlihatkan kenetralan terhadap isu tersebut. Dengan elemen tersebut, Tempo.co tetap berupaya dalam memberitakan isu tersebut dengan menyampaikan ke public sesuai dengan fakta dan mengkritik kebijakan yang dilakukan pemerintah. Tempo.co bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak manapun.

**Kata Kunci:** Framing, Tempo.co, Efisiensi Anggaran, Makan Bergizi Gratis (MBG)

## Abstract

Arifatul Amalia, 2022050028, 2025. News Coverage of Budget Efficiency in the Free Nutritious Meals (MBG) Program during the Prabowo Era: A Framing Analysis in the Online Media Tempo.co in February 2025. Study Program of Islamic Communication and Broadcasting, UNSIQ Central Java, Wonosobo. The spread of news regarding budget efficiency to support President Prabowo's flagship programs has been a topic of discussion among the Indonesian public since January 2025. For the media, this topic can be developed into engaging news that is consumable by the public in a timely manner. This study examines how news framing is applied by Tempo.co, a major media company. This research employs a qualitative method using Robert N. Entman's framing analysis model. The analysis was conducted on 10 news articles about budget efficiency in the Free Nutritious Meals (MBG) program published by Tempo.co. The analysis was carried out using four measures: problem identification, diagnosis of causes, moral judgment, and treatment recommendation. The study concludes that, based on these four elements, Tempo.co tends to exhibit neutrality toward the issue. Through these elements, Tempo.co strives to report the issue to the public factually while also providing critique on government policies. Tempo.co maintains a neutral stance and does not side with any party.

**Keywords:** Framing, Tempo.co, Budget Efficiency, Free Nutritious Meals (MBG)

## PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, manusia tidak dapat dipisahkan dari media massa dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Media massa memiliki peran strategis dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain sebagai mediator dalam konflik sosial serta sebagai sarana pembentukan persepsi publik terhadap kebijakan publik. Selain itu, media juga berfungsi sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi terhadap jalannya pemerintahan. Kemajuan media massa di suatu negara sering kali mencerminkan kondisi sosial, politik, dan demokrasi yang berkembang di negara tersebut (Nais Laras Wati, 2017; R & Fiorentina, 2018). Salah satu produk utama media massa adalah berita. Berita memiliki kekuatan dalam menggiring opini publik serta memengaruhi dan mengontrol kondisi sosial masyarakat. Dalam proses konsumsi informasi, publik berada pada dua posisi, yakni sebagai penerima pesan

dan sebagai individu yang mampu memproduksi berita. Selain menyampaikan informasi faktual, berita juga membingkai realitas melalui sudut pandang redaksional tertentu yang disusun dengan narasi khas media, sehingga makna suatu peristiwa dapat dipersepsikan secara berbeda oleh khalayak (R & Fiorentina, 2018; Maulana & Haydar, 2021).

Isi berita yang disajikan media pada dasarnya merupakan hasil konstruksi wartawan atau reporter. Konstruksi tersebut tidak terlepas dari pengaruh ideologi media serta kepentingan ekonomi politik media. Dalam praktiknya, media sering dihadapkan pada berbagai kepentingan, baik kepentingan perusahaan, pemilik modal, maupun aktor tertentu, yang kemudian memengaruhi cara media membingkai sebuah peristiwa. Akibatnya, satu isu yang sama dapat ditampilkan dengan perspektif berbeda oleh masing-masing media (Nais Laras Wati, 2017; Maulana & Haydar, 2021). Berbagai isu aktual kerap menjadi sorotan utama media massa, seperti isu ekonomi, teknologi, dan politik. Salah satu isu yang hangat diperbincangkan adalah efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang dilatarbelakangi oleh tingginya angka stunting di Indonesia. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 21,6 persen, sehingga pemerintah memandang perlu adanya intervensi kebijakan berbasis gizi (Putriyeksi et al., 2025).

Program MBG diperkuat oleh regulasi pemerintah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, pembentukan Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 semakin menegaskan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan program tersebut secara terstruktur dan berkelanjutan (Perpres No. 83 Tahun 2017; Perpres No. 83 Tahun 2024).

Melalui program unggulan ini, pemerintah berharap dapat menurunkan angka stunting, meningkatkan asupan gizi masyarakat, serta mendukung konsentrasi belajar peserta didik. Sasaran program MBG meliputi siswa sekolah, ibu hamil, serta masyarakat dengan keterbatasan akses pangan bergizi. Namun demikian, tujuan ideal program ini justru memunculkan kekhawatiran di kalangan publik, terutama setelah pemerintah melakukan pemangkasan anggaran dalam rangkuman 100 hari kerja Presiden Prabowo. Efisiensi anggaran tersebut salah satunya diarahkan untuk mendukung realisasi program MBG (Sazali, 2025). Pemerintah secara resmi mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun 2025 pada 22 Januari 2025. Kebijakan ini menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, sementara sebelumnya pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG. Dengan meningkatnya kebutuhan anggaran, pemerintah melakukan pemangkasan pada sejumlah sektor guna menopang keberlangsungan program tersebut (Inpres No. 1 Tahun 2025).

Seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran, berbagai spekulasi dan perdebatan muncul di tengah masyarakat. Isu ini memicu pro dan kontra karena sebagian publik khawatir efisiensi anggaran akan berdampak pada sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Media massa, baik cetak maupun daring, secara intens mengangkat isu efisiensi anggaran MBG sebagai headline utama. Meskipun Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada tenaga honorer dan sektor vital, kekhawatiran publik tetap mengemuka (Tempo.co, 2025). Keresahan tersebut mendorong berbagai elemen masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran. Aksi yang bertajuk "Indonesia Gelap" digelar secara serentak pada 17 Februari 2025 di berbagai daerah, seperti Sumatera Barat, Solo, Malang, Bandung, Bali, dan Jakarta Pusat. Selain itu, isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal turut memperkuat sentimen negatif publik terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah (Tempo.co, 2025).

Dalam kondisi demikian, masyarakat semakin bergantung pada media massa, khususnya media daring, sebagai sumber utama informasi terkait keberlanjutan program MBG dan kebijakan efisiensi anggaran. Media daring dinilai mampu menyajikan informasi secara cepat dan aktual, sehingga menjadi rujukan utama publik dalam membentuk pemahaman dan sikap terhadap isu-isu nasional yang berkembang (Maulana & Haydar, 2021). Tempo.co merupakan salah satu media daring yang aktif memberitakan isu program unggulan Presiden Prabowo, termasuk kebijakan

efisiensi anggaran MBG. Tempo.co dikenal sebagai media yang kritis dan vokal terhadap kebijakan serta kinerja pemerintah. Konstruksi pemberitaan yang disajikan Tempo.co kerap menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan luas di masyarakat, sehingga framing yang digunakan media ini menjadi menarik untuk dikaji secara ilmiah (Maulana & Haydar, 2021). Berdasarkan uraian tersebut, penulis memandang bahwa framing media daring memiliki peran penting dalam membentuk spekulasi dan persepsi publik terhadap isu efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemberitaan Efisiensi Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG): Analisis Framing di Media Daring Tempo.co pada Februari 2025”, guna memahami bagaimana media membingkai kebijakan pemerintah serta dampaknya terhadap opini publik (Nais Laras Wati, 2017; R & Fiorentina, 2018; Maulana & Haydar, 2021).

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Selama proses penelitian berlangsung, peneliti merujuk pada sejumlah penelitian terdahulu yang relevan guna memperkuat landasan teoretis dan metodologis penelitian. Salah satu penelitian yang menjadi rujukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Didi Permadi, Inas Sany Muyassaroh, Hartuti Purnaweni, dan Agus Setio Widodo berjudul “Media Massa dan Konstruksi Realitas (Analisis Framing Terhadap Pemberitaan UU IKN pada Media Online Tempo.co dan Mediaindonesia.com)” yang diterbitkan pada tahun 2024. Penelitian ini menganalisis framing pemberitaan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) pada dua media daring dengan topik yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mediaindonesia.com cenderung menghadirkan narasumber yang mendukung kebijakan UU IKN, sedangkan Tempo.co lebih berimbang dengan menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang. Temuan ini menunjukkan perbedaan ideologi media dalam membingkai kebijakan publik (Permadi et al., 2024).

Penelitian lain yang relevan adalah karya Hasrat Efendy Samosir, Anang Anas Azhar, dan Fuad Akbar yang berjudul “Analisis Framing Berita Vonis Kasus Penistaan Agama di Media Online Republika.co.id dan Detik.com” yang terbit pada tahun 2018. Penelitian ini berfokus pada konstruksi pemberitaan kasus penistaan agama di Kota Tanjung Balai dengan menggunakan model framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Republika.co.id lebih menekankan pesan ketenangan dan kondusivitas pasca vonis, sedangkan Detik.com cenderung membingkai berita dengan sudut pandang yang berpihak kepada terdakwa Meiliana. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana framing media dapat memengaruhi sikap dan persepsi publik terhadap isu keagamaan yang sensitif (Samosir, Azhar, & Akbar, 2018). Berbeda dengan fokus keagamaan, penelitian yang dilakukan oleh Shelamita Azzahra pada tahun 2023 berjudul “Framing Berita Kebijakan Pemerintah tentang Perdagangan Minyak Goreng di Kompas.com” mengkaji framing media dalam isu ekonomi. Penelitian ini menemukan bahwa Kompas.com membingkai kebijakan pemerintah terkait perdagangan minyak goreng sebagai kebijakan yang belum berjalan optimal. Media tersebut menonjolkan keluhan pedagang dan konsumen sehingga membentuk persepsi publik bahwa kebijakan pemerintah, termasuk penggunaan aplikasi PeduliLindungi, dinilai menyulitkan masyarakat. Penelitian ini menegaskan peran media dalam mengonstruksi realitas ekonomi melalui sudut pandang tertentu (Azzahra, 2023).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dewi Nurmala dan Hendra Setiawan pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Framing Pemberitaan Membuka Kemasan Ilegal Motor Ducati pada Media Dalam Jaringan CNNIndonesia.com dan Detiksport.com”. Penelitian ini berfokus pada framing pemberitaan di bidang otomotif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CNNIndonesia.com lebih menonjolkan aspek korban, yakni motor Ducati, untuk membangun daya tarik dan dramatisasi peristiwa. Sementara itu, Detiksport.com lebih menekankan pada pelaku pembukaan kemasan ilegal sehingga membentuk kesan pelanggaran hukum dan ketidakpatutan. Temuan ini menunjukkan bahwa framing media tidak hanya berlaku pada isu politik atau ekonomi, tetapi juga pada bidang otomotif (Nurmala & Setiawan, 2022).

Selain itu, analisis framing juga digunakan oleh Renita Sukma Melati dalam penelitiannya yang berjudul “Framing Identitas Keluarga Alternatif (Families of Choice) dalam Film (Studi Analisis Framing pada Film ‘Ali & Ratu-Ratu Queens’)” yang diterbitkan pada tahun 2024.

Penelitian ini menggunakan model framing Robert N. Entman untuk mengkaji representasi keluarga alternatif dalam film. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa film tersebut membingkai pandangan heteronormatif dan patriarki sebagai hambatan yang merugikan perempuan. Penelitian ini memperluas penerapan analisis framing tidak hanya pada berita, tetapi juga pada media film sebagai produk budaya populer (Melati, 2024).

Penelitian terdahulu lainnya adalah skripsi yang ditulis oleh Umi Haniah mengenai “Analisis Framing Dugaan Kecurangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu 2024 pada CNNIndonesia.com dan Antaranews.com”. Penelitian ini menunjukkan bahwa CNNIndonesia.com lebih banyak menggunakan narasumber dari pihak yang terlibat langsung dalam kasus, sementara Antaranews.com cenderung menyajikan tanggapan narasumber secara informatif dan institusional. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana karakter media memengaruhi aspek tematik dalam pemberitaan isu politik elektoral (Haniah, 2024). Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis framing telah banyak digunakan untuk mengkaji berbagai isu, mulai dari politik, agama, ekonomi, otomotif, hingga film. Namun, penelitian yang secara khusus membahas framing pemberitaan efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada media daring, khususnya Tempo.co, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi kebaruan dengan memfokuskan pada isu kebijakan sosial pemerintah dan bagaimana media daring membingkainya dalam konteks efisiensi anggaran pada Februari 2025.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis framing pemberitaan Tempo.co mengenai efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Februari 2025. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menelusuri makna dan konstruksi sosial yang dibentuk media terhadap suatu peristiwa. Framing media digunakan sebagai alat untuk memahami bagaimana realitas suatu fenomena dikonstruksi, serta untuk mengidentifikasi kecenderungan media dalam menyampaikan isu tertentu. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif-deskriptif, di mana fokusnya adalah mendeskripsikan fenomena atau peristiwa secara sistematis, faktual, dan akurat melalui analisis konten media (Robert N. Entman, 1993).

Secara konseptual, penelitian ini menitikberatkan pada dua fokus utama, yaitu efisiensi anggaran dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Efisiensi anggaran merupakan kebijakan pemerintah untuk memastikan keberlanjutan program unggulan, khususnya MBG, yang bertujuan memberikan makan bergizi bagi siswa sekolah, ibu hamil, dan masyarakat dengan keterbatasan akses. Sementara itu, program MBG merupakan inisiatif strategis pemerintah yang sangat diperhatikan publik melalui media, sehingga menjadi objek yang tepat untuk dianalisis menggunakan pendekatan framing (Assaroh Putriyeki et al., 2025). Sumber data penelitian dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari berita daring di Tempo.co selama bulan Februari 2025 yang membahas tentang efisiensi anggaran MBG. Sedangkan data sekunder meliputi dokumen pendukung seperti buku, jurnal, laporan penelitian terdahulu, peraturan pemerintah, serta observasi tambahan yang membantu memperkaya pemahaman peneliti terhadap konteks pemberitaan (Miles & Huberman, 1994).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi berita daring. Observasi digunakan untuk mengamati berita yang terbit secara langsung, termasuk struktur, gaya bahasa, dan isi yang disampaikan oleh Tempo.co. Berita yang dianalisis berjumlah sepuluh judul yang dipublikasikan sepanjang Februari 2025, mulai dari tanggal 3 hingga 18 Februari 2025, mencakup topik terkait strategi efisiensi anggaran kementerian hingga alokasi dana untuk MBG. Setiap berita dianalisis menggunakan model framing Robert N. Entman, yang membagi teks menjadi empat komponen: define problem (pendefinisian masalah), diagnose causes (penentuan penyebab masalah), make moral judgment (penilaian moral), dan treatment recommendation (penekanan solusi atau rekomendasi tindakan) (Entman, 1993). Dalam analisis data, peneliti menerapkan teknik Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah berita yang relevan dan menyaring informasi penting, penyajian data dilakukan dalam bentuk deskriptif naratif untuk menampilkan pola-pola framing, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara kritis



dengan menekankan bagaimana Tempo.co membingkai dan memaknai berita mengenai efisiensi anggaran MBG (Miles & Huberman, 1994).

Define problem berfokus pada bagaimana Tempo.co mendefinisikan permasalahan efisiensi anggaran MBG, termasuk sudut pandang dan fokus pemberitaan yang diambil. Diagnose causes menganalisis bagaimana media menjelaskan penyebab atau aktor terkait dalam isu tersebut, baik berupa individu, institusi, maupun faktor struktural. Make moral judgment menilai bagaimana media menyampaikan argumentasi moral atau etis terhadap kebijakan yang diberitakan. Terakhir, treatment recommendation menekankan bagaimana Tempo.co menyoroti solusi atau rekomendasi untuk menyelesaikan isu efisiensi anggaran tersebut, sehingga pembaca dapat menangkap arahan penyelesaian yang diusulkan media. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memetakan pola framing media daring, mengidentifikasi bias atau kecenderungan pemberitaan, serta memberikan pemahaman mendalam mengenai konstruksi berita seputar program pemerintah yang menjadi perhatian publik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Berita Tempo.co**

Peneliti mengumpulkan dan memilih berita yang terkait dengan efisiensi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengumpulan berita harian di Tempo.co. peneliti mengambil 10 berita yang ter upload pada Februari 2025 di website berita online Tempo.co. Adapun hasil analisis 10 berita tersebut sebagai berikut :

#### **1. Analisis Berita 1**

Judul : Strategi Menteri PU Hadapi Pemangkasan Anggaran : Kurangi Perjalanan Dinas hingga Makan Nasi Bungkus  
Edisi : Senin, 3 Februari 2025

Setelah keluarnya kebijakan presiden yang menintruksikan terhadap efisiensi anggaran APBN dana APBD tahun 2025 sebesar Rp 306,6 triliun, kini Menteri Pekerjaan Umum (Mentri PU) menyebutkan anggaranya tersisa Rp 26 triliun. Adapun pagu dana sebelumnya yaitu sebesar Rp 110,95 triliun. Hal tersebut disebutkan oleh Dody Hanggodo dengan rasa optimistis pemangkasan anggaran tersebut tidak akan mengganggu program-program yang sudah direncanakan oleh kementeriannya. Ia juga menyebutkan efisiensi dan evektifitas menjadi suatu keharusan. Dengan cara penekanan pada perjalanan dinas, ongkos rapat, hingga konsumsi.

Kementerian Pekerjaan Umum juga menambahkan bahwa kementeriannya kemungkinan akan mengajak investor dalam kebutuhan pendanaan yang sesuai dengan IRR nya (internal rate of return/ pengembalian modal). Berbeda dengan kepala Pusat Makroejomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman yang menilai bahwa pemangkasan anggaran sebaiknya tidak dalam bidang infrastruktur karena baginya hal tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi domestik. Selain itu, disebutkan juga dampaknya menjadikan negara akan sangat menggantungkan pada proyek-proyek swasta atau Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha (KPBU). Dengan begitu, ia mengharapakan pemerintah harus lebih selektif dalam kebijakan efisiensi anggaran tersebut.

**Tabel 4. 1**

**“Strategi Menteri PU Hadapi Pemangkasan Anggaran : Kurangi Perjalanan Dinas hingga Makan Nasi Bungkus”**

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Problem Identification</i><br>(Pendefinisian Masalah)           | Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo menyatakan anggaran kementeriannya untuk tahun ini tersisa Rp 26 triliun. Hal ini setelah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi APBN dan APBD tahun 2025. Adapun sebelumnya, pagu anggaran Kementerian PU untuk tahun anggaran 2025 ditetapkan senilai Rp 110,95 triliun.                                                         |
| <i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah) | Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menginstruksikan efisiensi APBN dan APBD melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Kepala negara meminta untuk melakukan efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 306,6 triliun. Rinciannya, efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun. |
| <i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)              | Meski begitu, Dody optimistis pemangkasan anggaran ini tidak mengganggu program-program di kementeriannya. Ia lantas mengatakan, efektivitas dan efisiensi menjadi suatu keharusan. Menurut dia, ongkos untuk rapat, perjalanan dinas, hingga konsumsi mesti ditekan.                                                                                                                              |
| Treatment Recommendation(Menekankan Penyelesaian)                  | "Yang harus dilakukan pemerintah tentu pemangkasannya mestinya selektif." tutur Rizal. "Hindari pemangkasan pada infrastruktur, apalagi yang mendukung terhadap produktivitas ekonomi."                                                                                                                                                                                                            |

**Problem Identification**, melalui temuan teks yang termasuk kedalam elemen ini, Tempo.co ingin menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah melalui efisiensi anggaran menjadi PR utama Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) dalam mengelola anggaran. Sehingga anggaran Kementerian Pekerjaan Umum tersisa Rp 26 triliun dengan pagu dana awal sebesar Rp 110,95 triliun.

**Diagnose Causes** (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah) Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menginstruksikan efisiensi APBN dan APBD melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Kepala negara meminta untuk melakukan efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 306,6 triliun. Rinciannya, efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun. **Make Moral Judgement** (Membuat Keputusan Moral) Meski begitu, Dody optimistis pemangkasan anggaran ini tidak mengganggu program-program di kementeriannya. Ia lantas mengatakan, efektivitas dan efisiensi menjadi suatu keharusan. Menurut dia, ongkos untuk rapat, perjalanan dinas, hingga konsumsi mesti ditekan.

**Treatment Recommendation** (Menekankan Penyelesaian) “Yang harus dilakukan pemerintah tentu pemangkasan yang selektif.” tutur Rizal. “Hindari pemangkasan pada infrastruktur, apalagi yang mendukung terhadap produktivitas ekonomi.” Problem Identification, melalui temuan teks yang termasuk kedalam elemen ini, Tempo.co ingin menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah melalui efisiensi anggaran menjadi PR utama Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) dalam mengelola anggaran. Sehingga anggaran Kementerian Pekerjaan Umum tersisa Rp 26 triliun dengan pagu dana awal sebesar Rp 110,95 triliun.

**Diagnose Causes**, melalui teks berita tersebut, Tempo.co menyajikan perkiraan masalah atau sumber masalah terjadi karena pemerintah melakukan kebijakan efisiensi Rp.306,6 triliun melalui APBN dan APBD dengan rincian efisiensi anggaran di Kementerian sebesar Rp 256,1 Triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun. Kemudian Tempo.co seakan kebijakan ini tidak efektif bagi kementerian tersebut karena akan menghambat pembangunan infrastruktur.

“Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menginstruksikan efisiensi APBN dan APBD melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Kepala negara meminta untuk melakukan efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 306,6 triliun.” Dapat dilihat dari paragraf tersebut yakni pada lead berita yang diberitakan Tempo.co menunjukkan permasalahan utama mengenai pemangkasan yang berdampak pada Kementerian Pekerjaan Umum (Menteri PU). Tempo.co memilih Doddy Hanggodo sebagai narasumber dalam menanggapi efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah.

**Make Moral Judgment**, Tempo.co ingin menunjukkan bahwa efisiensi sebagai langkah bijak dan diperkuat dengan kutipan Dody akan rasa optimistisnya terhadap program akan sesuai rencana. Dengan teks dalam berita tersebut sebagai berikut. Meski begitu, Dody optimistis pemangkasan anggaran ini tidak mengganggu program-program di kementeriannya. Ia lantas mengatakan, efektivitas dan efisiensi menjadi suatu keharusan. Menurut dia, ongkos untuk rapat, perjalanan dinas, hingga konsumsi mesti ditekan. Kontras dengan tanggapan moral yang diberikan oleh Abdul Manap Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dengan menyebutkan harapan pemangkasan anggaran dalam bidang infrastruktur hanya dilakukan pada anggaran perawatan bukan Pembangunan baru. Hal ini disebutkan karena sektor infrastruktur memiliki multiplier effect bagi perekonomian nasional. Treatment Recommendation, Tempo.co seakan menunjukkan penekanan penyelesaian dengan pemnecanan angaran untuk ongkos, perjalanan dinas, dan konsumsi yang dilakukan oleh Menteri PU.

“Nggak banyak rapat-rapat, nggak banyak jalan-jalan (perjalanan dinas), banyak makan bungkus (nasi bungkus) saja,” kata Dody saat ditemui di Kementerian PU pada Jumat, 31 Januari 2025. Tempo.co juga menyajikan penekanan terhadap penyelesaian masalah yaitu dalam menangani pendanaan, harus mengkaitkan atau mengajak investor yang sesuai dengan IRR (internal rate of return/pengembalian modal).

Dody mengatakan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur memang tidak sedikit. Karena itu, dia tidak menutup kemungkinan mengajak investor berkontribusi. “Tapi kan pasti tidak semua proyek infrastruktur pemerintah itu menarik swasta. Mesti ada hitung-hitungan, kalau IRR-nya (internal rate of return/pengembalian modal) bagus, why not?” ucap Dody. Selain itu, penyajian penyelesaian masalah yang ditulis Tempo.co terlihat dari penyajian penekanan terhadap pemerintah supaya lebih selektif terhadap bidang yang ingin dipangkas anggarannya, terutama infrastruktur sebagai penunjang ekonomi

## 2. Analisis Berita 2

Judul : Anggaran Kementerian Keuangan Kena Efisiensi Rp 12,3 Triliun, Begini Penjelasan Kepala Biro Komunikasi  
Edisi : Senin, 3 Februari 2025

Intruksi Presiden Prabowo terkait penghematan atau pemangkasan mulai dilaksanakan oleh beberapa yang berada dalam kabinet Merah Putih salah satunya yaitu Kementerian Keuangan (KemenKeu). Dari penghematan anggaran tersebut KemenKeu dikabarkan akan mengalami dampak efisiensi sebesar Rp 12,3 triliun. Total anggaran Kementerian Keuangan

sebesar Rp 12,3 triliun dari hasil terbitnya instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 ini disebutkan masih dalam tahap peninjauan atau review. Hal tersebut dipaparkan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Sujantoro.

Kabar adanya penghematan anggaran yang dikeluarkan setelah Inpres ini menyebutkan rincian anggaran pagu oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp 53,19 triliun. Sedangkan dampak dari efisiensi anggaran sebesar Rp 12,35 triliun. Namun, Deni menyebutkan bahwa rincian anggaran tersebut bukan berasal dari Direktorat Jendral Anggaran (DJA). Kementerian Keuangan oleh Deni menyebutkan bahwa Kementerian dan Lembaga yang terkena dampak efisiensi tersebut bukan tergolong kedalam pemangkasan, akan tetapi ia menyebutkan sebagai pembintangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya telah mengeluarkan surat dengan nomor S-37/MK.02/2025 sebagai bentuk tindak lanjut kebijakan mengenai efisiensi tersebut. Surat tersebut diinstruksikan bagi Kementerian dan Lembaga untuk menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi yang nantinya akan diserahkan kepada mitra Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasil dari revisi yang sudah disetujui DPR nantinya akan diserahkan kepada Menteri Keuangan atau Direktur Jendral dengan tenggat waktu 14 Februari 2025.

**Tabel 4. 2**  
**“Anggaran Kementerian Keuangan Kena Efisiensi Rp 12,3 Triliun, Begini**  
**Penjelasan Kepala Biro Komunikasi”**

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Problem Identification</i><br>(Pendefinisian Masalah)           | Sebelumnya beredar daftar rincian anggaran kementerian dan lembaga yang dihemat setelah terbitnya Inpres. Dalam daftar berbentuk tabel tersebut dipaparkan pagu total anggaran Kementerian Keuangan sebesar Rp 53,19 triliun. Sedangkan yang terdampak efisiensi sebesar Rp 12,35 triliun.                                                |
| <i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah) | Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengeluarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 sebagai tindak lanjut Inpres penghematan. Dalam surat tersebut kementerian dan lembaga diminta menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran kepada mitra Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan. |
| <i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)              | Deni menjelaskan anggaran kementerian dan lembaga yang terdampakefisiensi tersebut bukan tergolong pemangkasan, tapi pembintangan. “Pembintangan maksudnya anggaran tersebut belum bisa digunakan,” ucapnya.                                                                                                                              |



|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Treatment<br>Recommendation(Menekankan<br>Penyelesaian) | Hasil usulan revisi berupa pembintangan anggaran yang sudah disetujui DPR diserahkan kepada Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Anggaran paling lambat 14 Februari 2025. “Apabila sampai dengan tanggal 14 Februari 2025 kementerian/lembaga belum mengusulkan revisi sebagaimana dimaksud, maka Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran secara mandiri akan mencantumkan dalam catatan halaman IV A DIPA,” demikian tertulis dalam surat menteri dikutip Senin, 3 Februari 2025. |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Problem Identification** (Pendefinisian Masalah) Sebelumnya beredar daftar rincian anggaran kementerian dan lembaga yang dihemat setelah terbitnya Inpres. Dalam daftar berbentuk tabel tersebut dipaparkan pagu total anggaran Kementerian Keuangan sebesar Rp 53,19 triliun. Sedangkan yang terdampak efisiensi sebesar Rp 12,35 triliun.

**Diagnose Causes** (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah) Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengeluarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 sebagai tindak lanjut Inpres penghematan. Dalam surat tersebut kementerian dan lembaga diminta menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran kepada mitra Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan.

**Make Moral Judgement** (Membuat Keputusan Moral) Deni menjelaskan anggaran kementerian dan lembaga yang terdampak efisiensi tersebut bukan tergolong pemangkasan, tapi pembintangan. “Pembintangan maksudnya anggaran tersebut belum bisa digunakan,” ucapnya.

**Treatment Recommendation** (Menekankan Penyelesaian) Hasil usulan revisi berupa pembintangan anggaran yang sudah disetujui DPR diserahkan kepada Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Anggaran paling lambat 14 Februari 2025. “Apabila sampai dengan tanggal 14 Februari 2025 kementerian/lembaga belum mengusulkan revisi sebagaimana dimaksud, maka Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran secara mandiri akan mencantumkan dalam catatan halaman IV A DIPA,” demikian tertulis dalam surat menteri dikutip Senin, 3 Februari 2025.

**Problem Identification**, melalui temuan teks yang termasuk ke dalam elemen ini yaitu terdapat di paragrafpertama. Tempo.co ingin menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden (InPres) terkait dengan penghematan anggaran mulai dilaksanakan. Khususnya di Kementerian Keuangan (KemenKeu) yang akan terdampak efisiensi sebesar Rp 12,3 triliun. Sebelumnya beredar daftar rincian anggaran kementerian dan lembaga yang dihemat setelah terbitnya Inpres. Dalam daftar berbentuk tabel tersebut dipaparkan pagu total anggaran Kementerian Keuangan sebesar Rp 53,19 triliun. Sedangkan yang terdampak efisiensi sebesar Rp 12,35 triliun. Paragraph tersebut menjelaskan permasalahan yaitu terdampaknya anggaran Kementerian Keuangan sebesar Rp 12, 3 triliun dengan dana pagu awal sebesar Rp 53,19 triliun.

**Diagnose Causes**, dalam teks berita tersebut, Tempo.co menunjukkan sumber atau penyebab dari permasalahan yaitu adanya daftar rincian anggaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan yang tidak benar. Rincian tersebut bukan bagian dari surat yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan nomor surat S-37/MK.02/2025. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Sujantoro menegaskan anggaran tersebut merupakan pembintangan bukan pemangkasan. Artinya anggaran tersebut hanya belum bisa digunakan Kutipan dalam berita tersebut menjadikan Tempo.co menunjukkan surat edaran dari Kementerian Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang

melaksanakan perintah kebijakan oleh Presiden Prabowo, sebagai sumber masalah terhadap efisiensi anggaran yang dilakukannya.

**Make Moral Judgement**, penilaian moral dalam berita tersebut ditunjukkan oleh Tempo.co pada penyebutan pembintangan disbanding pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Sunjantoro. Hal tersebut menjadikan pembintangan berita yang positif sebagai langkah bertanggung jawab fiskal.

**Treatment Recommendation**, melalui temuan teks yang termasuk kedalam treatment recommendation yaitu disebutkan proses identifikasi efisiensi yang nantinya akan diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan pembintangan anggaran yang sudah disetujui oleh DPR akan menjadikan penghematan anggaran secara makro.

### 3. Analisis berita 3

Judul : 100 Hari Kabinet Prabowo: Bongkar Pasang Anggaran Mengamankan Ongkos Makan Bergizi Gratis

Edisi : Selasa, 4 Februari 2025

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terlaksana luas sejak 6 Januari 2025. Program yang sebelumnya sudah disebutkan oleh Presiden Prabowo sejak kampanye ini, telah terlaksana sebelum 100 hari masa kerja aktif Presiden. Program ini telah tersalurkan sekitar 750 ribu siswa sekolah di Indonesia satubulan pertama. Program ini memiliki target sebesar 15 juta penerima di tahun pertama, hingga perlahan kenaikan target akan sampai puncak dengan target 82,9 juta penerima program ini di tahun 2029. Dengan target tersebut terdapat alokasi dana sebesar Rp 71 triliun yang diserahkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam APBN. Namun, tidak sampai dua pekan program unggulan ini berjalan, Presiden Prabowo meminta untuk percepatan tersalurkan program MBG bagi seluruh anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Prabowo juga meminta BGN untuk memenuhi target 82,9 juta penerima program unggulan ini. Dimana, target tersebut merupakan target di tahun 2029. Dengan adanya keterbatasan anggaran awal, Prabowo menekankan dan memberikan Instruksi Presiden (InPres) Nomor 1 Tahun 2025. Dalam kebijakan tersebut Prabowo meminta instansi-instansi pemerintah dapat mengalokasikan dana sebesar Rp 306,69 triliun guna melangsungkan dana tambahan untuk program unggulannya. Kebijakan tersebut menintruksikan efisiensi anggaran sebesar Rp 256,1 triliun anggaran Kementerian/Lembaga, dan Rp 50,59 triliun anggaran transfer ke daerah. Efisiensi tersebut merujuk pada pemangkasan anggaran per Lembaga atau daerah yang sekiranya tidak mengganggu program kerja, seperti perjalanan dinas, seremonial, pengadaan alat dan mesin dan lain sebagainya.

Adanya efisiensi tersebut juga mendapatkan respon baik dari berbagai Kementerian, namun tidak sedikit juga yang memberi respon buruk bagi kebijakan Prabowo tersebut. Dengan alasan dengan dibukanya peluang MBG mendapat dana dari berbagai Lembaga, akan memberatkan APBN dan menjadikan deficit hingga kabinet Gemuk.

#### Tabel 4. 3

#### “100 Hari Kabinet Prabowo: Bongkar Pasang Anggaran Mengamankan Ongkos Makan Bergizi Gratis”

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Problem Identification</i><br>(Pendefinisian Masalah)              | <p>Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 17 Januari 2025, Prabowo meminta percepatan pemberian MBG bagi seluruh anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui yang menjadi target penerima program tersebut. Sebabnya, Prabowo menerima banyak laporan masyarakat yang mengaku anak-anaknya belum merasakan MBG sejak program dimulai.</p> <p>Tak tanggung-tanggung, Prabowo meminta BGN memenuhi target 82,9 juta penerima manfaat di akhir 2025. Padahal semula, target tersebut merupakan proyeksi untuk 2029. Dadan menyanggupi target baru itu selama ada penambahan anggaran.</p> |
| <i>Diagnose Causes</i><br>(Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah) | "Kami sampaikan, tambahan Rp 100 triliun cukup untuk memberikan makan kepada seluruh manfaat 82,9 jiwa," kata Dadan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Make Moral Judgement</i><br>(Membuat Keputusan Moral)              | "Tentu ada konsekuensi, mungkin butuh penambahan biaya. Sehingga dari hasil penghematan kemarin kami lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk Program makan bergizi gratis," kata Prasetyo pada Kamis, 23 Januari 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Treatment Recommendation</i><br>(Menekankan Penyelesaian)          | Pada 22 Januari, Prabowo meneken perintah penyisiran anggaran di instansi-instansi pusat dan daerah. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Prabowo meminta seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran. Melalui Inpres tersebut, Prabowo meminta instansi-instansi pemerintah bisa mengakumulasi dana hingga Rp 306,69 triliun.                                                                                                                                                                                                               |

**Problem Identification**, melalui temuan teks yang termasuk kedalam elemen ini, Tempo.co ingin menunjukkan bahwa permasalahan dari berita yang diterbitkan yaitu Presiden Prabowo ingin mempercepat target penerima manfaat program unggulannya. Dimana target awal penerima program ini sebesar 750 siswa dan Prabowo ingin seluruh anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui juga bisa merasakan manfaat program unggulan di tahun ini. Setidaknya total keseluruhan target yang digadangkan di tahun 2029 sekitar 82,9 juta.

**Diagnose Causes**, melalui kutipan yang terdapat pada pemberitaan ini, Tempo.co menyajikan penyebab masalah terjadi karena kurangnya anggaran yang dapat dipenuhi untuk menunjang program unggulan ini. Tempo.co menyajikan data dana awal untuk melangsungkan program unggulan ini sebesar Rp 71 triliun. Dengan adanya percepatan target yang diinginkan Prabowo, anggaran tersebut tidak memadai. Hal tersebut menjadikan Kepala Badan Gizi Nasional meminta tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun.

**Make Moral Judgement**, Tempo.co ingin menunjukkan bahwa terdapat respon baik dari Sekretaris Negara melalui kutipan pada pemberitaan tersebut. Yakni terdapat rasa maklum dengan adanya penambahan anggaran yang akan menunjang program unggulan Presiden Prabowo. Disisi lain, Tempo.co juga ingin menunjukkan respon negatif terhadap kebijakanyang

diambil Presiden. Hal tersebut ditunjukkan Tempo.co melalui wawancara dengan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) yang menyebutkan rasa khawatir dengan kebijakan tersebut akan berdampak buruk. "Dan itu kalau mau diambil untuk MBG, dikhawatirkan kemiskinan bukan turun tapi di beberapa daerah justru naik. Program prioritas per kepala daerah pun juga akan terhambat," ucap Bhima.

**Treatment Recommendation**, melalui teks pada berita tersebut, solusi yang disajikan oleh Tempo.co berupa adanya Instruksi Presiden (InPres) Nomor 25 Tahun 2025. Yang menyebutkan akan diadakannya efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun. Instruksi tersebut ditujukan untuk Kementerian dan lembaga, serta instansi-instansi pada tanggal 22 Januari 2025. Selain itu, Tempo.co juga menunjukkan adanya Solusi dari berbagai pihak yang memberikan respon negatif terhadap efisiensi anggaran. Tempo.co menunjukkan hal tersebut melalui berbagai wawancara kepada beberapa tokoh penting. Salah satunya yaitu Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani yang mengusulkan pemerintah untuk menggunakan dana dari hasil cukai rokok. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar dalam wawancara Tempo.co juga menyarankan pemerintah untuk mengambil dana dari dana zakat, infak, hingga sedekah. "Untuk MBG saya usul ambil dari cukai rokok saja, sudah selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 triliun," kata Irma pada Kamis, 16 Januari 2025. "Pemerintah perlu menyiapkan skema pembiayaan yang partisipatif agar program ini dapat berjalan baik dan maksimal dengan semangat gotong royong," kata Sultan pada Sabtu, 11 Januari 2025.

#### 4. Analisis Berita 4

Judul : DPR Minta Kementerian Keuangan Pertimbangkan Efisiensi Anggaran di Kemenkes, Ada Alokasi untuk Obat dan Vaksin

Edisi : Jumat, 7 Februari 2025

Kementerian Keuangan diminta mempertimbangkan ulang terkait pemangkasan anggaran di Kementerian Kesehatan sebesar Rp 19,6 triliun. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi IX DPR RI Felly Esterita yang mengatakan terdapat anggaran yang tidak bisa diganggu gugat. Felly menyebut anggaran tersebut merupakan keterkaitan dengan hajat hidup Masyarakat, Dimana anggaran tersebut belum mencukupi untuk pendanaan obat dan vaksin.

Pagu awal Kementerian Kesehatan Rp 105 triliun diperinci oleh Felly yaitu sebesar Rp 46 triliun guna pembayaran BPJS Kesehatan Penenrima Bantuan Iuran (PBI) dan sebesar Rp 2,5 triliun digunakan untuk BPJS Kesehatan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPUP). Felly menyebut sisa anggaran setelah dipotong untuk gaji dan Listrik tidak memadai. DPR mendesak agar anggaran sebesar Rp 10 triliun bisa dikembalikan ke Kementerian Kesehatan.

Anggaran Kementerian Kesehatan terkena pemangkasan sebesar Rp 19,6 triliun dari dana pagu awal. Pemangkasan tersebut ternyata berdampak pada realokasi dana program prioritas seperti vaksin dan obat-obatan. Menteri Kesehatan akan mengevaluasi Kembali terkait dengan pemangkasan anggaran sampai bulan juni. Pemangkasan anggaran di Kementerian Kesehatan tersebut sebagai tindak lanjut dari surat yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Surat tersebut bernomor S037/MK.02/2025 dalam pelaksanaan APBN TA 2025.

#### Tabel 4. 4

**"DPR Minta Kementerian Keuangan Pertimbangkan Efisiensi Anggaran di Kemenkes, Ada Alokasi untuk Obat dan Vaksin"**

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Problem Identification</i><br>(Pendefinisian Masalah)              | Ketua Komisi IX DPR RI Felly Esterita Runtuwene meminta Kementerian Keuangan mempertimbangkan ulang efisiensi anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp19,6 triliun. Felly mengatakan ada alokasi anggaran Kementerian Kesehatan yang seharusnya tidak boleh diutak-atik karena menyangkut hajat hidup publik.                                                                                                                           |
| <i>Diagnose Causes</i><br>(Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah) | Adapun ketetapan pemangkasan anggaran merupakan bagian dari evaluasi penggunaan dana didasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025.                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Make Moral Judgement</i><br>(Membuat Keputusan Moral)              | Felly beralasan beasiswa untuk tenaga medis diperlukan karena Indonesia masih kekurangan dokter dan pekerja di sektor kesehatan lain. Politikus Partai Nasional Demokrat itu ingin masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang sepatutnya. "Paling tidak dari Rp 19 triliun dikembalikan sekitar Rp 10 triliun agar program yang menyangku obat, vaksin, kemudian beasiswa tenaga kesehatan tidak terganggu," kata Felly menegaskan. |
| <i>Treatment Recommendation</i><br>(Menekankan Penyelesaian)          | Ia menyebut DPR mendesak setidaknya anggaran sebesar Rp 10 triliun bisa dikembalikan ke Kemenkes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Problem Identification**, melalui temuan teks yang termasuk dalam elemen ini, Tempo.co ingin menunjukkan adanya efisiensi anggaran oleh Kementerian Keuangan yang berakibat terganggunya anggaran di Kementerian Kesehatan (KemenKes). Yaitu menjadikan terganggunya anggaran di obat-obatan dan vaksin. Tempo.co juga ingin menunjukkan usulan dari Ketua Komisi IV DPR RI untuk mempertimbangkan ulang terkait efisiensi anggaran Kementerian Kesehatan.

**Diagnose Causes**, melalui temuan teks Tempo.co ingin menunjukkan sumber permasalahan yaitu adanya surat edaran dari Kementerian Keuangan dengan surat Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja K/L dalam pelaksanaan APBN TA 2025.

**Make Moral Judgement**, Tempo.co menunjukkan bahwa beasiswa untuk tenaga medis dibutuhkan karena mengingat di Indonesia masih kekurangan dokter dan juga pekerja di sektor Kesehatan. Selain itu, Tempo.co juga ingin menunjukkan melalui kutipan Ketua Komisi IV DPR RI terkait dengan kurangnya anggaran di obat-obatan dan vaksin.

**Treatment Recommendation**, melalui temuan teks, Tempo.co ingin menunjukkan Solusi untuk permasalahan mengenai keterbatasan anggaran setelah dilakukannya efisiensi di Kementerian Kesehatan. Hal tersebut ditunjukkan melalui kutipan yang meminta untuk mengembalikan anggaran sebesar Rp 10 triliun. Anggaran tersebut guna menutup kekurangan anggaran di vaksin, obat-obatan, serta beasiswa untuk tenaga medis.

## 5. Analisis Berita 5

Judul : Program Makan Bergizi Gratis Mendapat Rp 100 Triliun dari Pemangkasan Anggaran



Edisi : Jumat, 7 Februari 2025

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun dari efisiensi yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga (K/L). hal tersebut dibenarkan oleh Badan Gizi Nasional. Anggaran tersebut dari 16 pos Kementerian yang disebutkan oleh Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN Tengku Syahdana. Presiden Prabowo sebelumnya menargetkan efisiensi anggran sebesar Rp 306,69 triliun melalui Inruksi Presiden (InPres). Dimana anggaran dari efisiensi tersebut akan dialokasikan pada program unggulan Prabowo sebesar Rp 100 triliun. Presiden juga meminta kepada Menteri Keuangan agar memperkuat belanja-belanja yang dianggap memberikan dampak terhadap perbaikan perekonomian dan kesejahteraan. Presiden juga meminta anggaran untuk Masyarakat dengan tujuan Masyarakat mendapatkan manfaatnya secara langsung.

**Tabel 4. 5****“Program Makan Bergizi Gratis Mendapat Rp 100 Triliun dari Pemangkasan Anggaran”**

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Problem Identification</i><br>(Pendefinisian Masalah)              | Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menargetkan total efisiensi atau penghematan belanja Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah sekitar Rp306 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 100 triliun dikabarkan bakal dialihkan untuk program makan bergizi gratis.                                                                                                                                                   |
| <i>Diagnose Causes</i><br>(Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah) | Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presiden meminta belanja-belanja yang dianggap memberi dampak terhadap perbaikan perekonomian dan kesejahteraan diperkuat. Karena itu, Prabowo menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien.                                                                                                                                  |
| <i>Make Moral Judgement</i><br>(Membuat Keputusan Moral)              | Dadan mengklaim BGN fokus menyiapkan realisasi MBG karena ingin mempercepat pencapaian target penerima manfaat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Treatment Recommendation</i><br>(Menekankan Penyelesaian)          | Penggunaan anggaran akan lebih ditujukan bagi langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung. “Seperti makan bergizi gratis, juga beberapa langkah seperti swasembada pangan, energi, kemudian perbaikan sektor kesehatan serta langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat untuk bisa menjadi sumber daya masyarakat yang makin unggul,” ujarnya beberapa waktu lalu. |

**Probelem Identification**, melalaui temuan teks yang termasuk kedalam elemen ini, Tempo.co ingin menunjukan permasalahan dalam pemberitaanya yaitu adanya target dari Presiden Prabowo mengenai efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 riliun. Dimana sebesar Rp 100 triliun akan dialokasikan guna melanjutkan program unggulan yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

**Diagnose Causes**, melalui temuan teks, Tempo.co ingin menunjukkan sumber permasalahan dari pemberitaanya yaitu Presiden Prabowo meminta Menteri Keuangan untuk memperkuat belanja-belanja yang dianggap memberikan dampak bagi keberlangsungan dan kesejahteraan pada perbaikan ekonomi. Maka dari itu, Presiden menginstruksi untuk melaksanakan pemfokusan pada efisiensi anggaran.

**Make Moral Judgement**, Tempo.co ingin menunjukkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) selalu siap dalam menjalankan tugas presiden dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN juga menyebutkan akan terus menyampaikan besaran kebutuhan guna melaksanakan program tersebut. "Badan Gizi Nasional fokus menyiapkan program itu. Anggaran adalah kewenangan presiden termasuk sumbernya. BGN selalu siap untuk melaksanakan dan akan menyampaikan besaran kebutuhan sesuai periode pelaksanaan," kata Dadan saat dihubungi Tempo pada Jumat, 7 Februari 2025.

**Treatment Recommendation**, melalui kutipan yang terdapat pada berita tersebut, Tempo.co menyajikan solusi dari permasalahan tersebut yaitu penggunaan anggaran akan lebih dialokasikan yang sekiranya masyarakat merasakan manfaat secara langsung. Seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, energi, perbaikan sektor Kesehatan, serta langkah-langkah yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas masyarakat sehingga menjadikan masyarakat yang unggul.

## B. Analisa Data Penelitian

Dari hasil temuan yang telah diteliti pada Tempo.co dalam isu efisiensi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) era Prabowo, penulis menemukan adanya sebuah pembentukan *frame* bahwa sebenarnya Tempo.co ingin bersikap netral pada pemberitaan isu tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari pemberitaan bahwa Tempo.co yang lebih menjurus ingin memberikan kritik terhadap pemerintah tentang efisiensi anggaran, namun Tempo.co juga ingin memberikan edukasi dan pemahaman terhadap pembaca mengenai pentingnya program Makan Bergizi Gratis.

Pada berita tentang efisiensi anggaran Makan Bergizi Gratis, pada elemen *problem identification* (identifikasi masalah) terlihat bahwa Tempo.co ingin menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini membuat beberapa sektor pemerintahan dan Masyarakat memiliki dampak yang cukup besar. Pada elemen *diagnose causes* (memperkirakan masalah atau sumber masalah) tampaknya Tempo.co ingin menunjukkan bahwa kebijakan ini dianggap kurang selektif dan kebijakan ini dianggap perlu dioptimalkan kembali sebelum diimplementasikan di Kementerian dan Lembaga (K/L). Pada elemen *make moral judgement* (membuat keputusan moral) Tempo.co ingin membuktikan kecenderungan Tempo.co bahwa program unggulan didukung dan memang memiliki manfaat yang cukup besar bagi masyarakat di Indonesia khususnya anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Akan tetapi Tempo.co juga tegas dalam menunjukkan Langkah guna tujuan tersebut yaitu memberikan dampak bagi banyak sektor yang menjadi masalah baru.

Pada elemen *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian) terlihat bahwa Tempo.co memberikan saran bahwa pemerintah seharusnya lebih selektif dalam memangkas anggaran melalui kebijakan yang dibuat. Selain itu, Tempo.co ingin menunjukkan sara berupa sifat hati-hati bagi pemerintah dalam mengalokasikan anggaran yang dihasilkan dari pemangkas anggaran. Dalam pemberitaan efisiensi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) era Prabowo ini, strategi pembingkai berita pada Tempo.co lebih menonjol pada elemen *problem identification*. Pada elemen ini, Tempo.co lebih ingin pembaca memahami dampak yang ditimbulkan melalui kebijakan pemerintah. Disisi lain, Tempo.co juga menonjolkan pembingkai melalui elemen *treatment recommendation*. Pada elemen ini, Tempo.co yang mengharapkan pemerintah dapat lebih memfokuskan kebijakan secara teliti dan selektif.

Berdasarkan pada elemen-elemen yang sudah terpaparkan pada analisis *framing* Robert N. Entman, maka menjadi sesuai apabila dalam pembingkai berita efisiensi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan pembingkai model ini. Untuk itu dalam penelitian ini yang berfokus pada pembingkai atau analisis *framing* pada pemberitaan efisiensi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) era Prabowo melalui konsepsi elemen Robert N. Entman yaitu realitas yang ditonjolkan mempunyai kemungkinan besar dalam mempengaruhi dan diperhatikan oleh

Masyarakat. Pembingkaiannya melalui metode *framing* Robert N. Entman yang menonjolkan realitas dapat merujuk pada tokoh besar Thomas Luckman dengan Peter L. Berger dalam teorinya "*The Social Construction Of Reality*" di tahun 1966, yang menekankan realitas sosial seperti konstruksi berita yang dibentuk melalui interaksi dialektis atau realitas terbentuk melalui proses sosial berupa interaksi dan tindakan. Dimana realitas diciptakan oleh individu secara terus-menerus yang dimiliki dan dialami secara subjektif.

Melalui analisis *framing* pada pemberitaan efisiensi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) era Prabowo. Tempo.co menerapkan konstruksi realitas sosial melalui makna dan penyajian konsep, wacana publik, dan kesadaran umum sehingga menciptakan realitas dari konstruksi sosial. terlihat dari berkesinambungnya antar elemen pada *framing* Robert N. Entman. Seperti *identification problem* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (sumber masalah), *make moral judgement* dan *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian) Dalam hal ini Tempo.co ingin menyatukan pembaca dan media mengenai kebijakan efisiensi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tempo.co menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah melalui efisiensi anggaran memiliki makna bahwa bertujuan untuk program unggulan dengan memberikan hasil anak di Indonesia tidak lagi mengalami kelaparan. Akan tetapi, Tempo.co ingin menegaskan kepada pembaca bahwa kebijakan yang bertujuan baik tersebut memiliki dampak di divisi yang lain dan dapat merugikan. Secara tidak langsung, Tempo.co ingin menunjukkan sifat media berupa memberitakan isu tersebut secara cepat. Selain itu, Tempo.co ingin memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa isu kebijakan mengenai efisiensi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) ini dianggap penting. Penulis menyimpulkan bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh media Tempo.co menggunakan pembingkaiannya berita metode Robert N. Entman menemukan titik strategi media tersebut. Dimana dilihat dari berita yang diteliti selama bulan Februari, berita-berita tersebut memiliki selisih waktu pengunggahan dalam kurun waktu yang singkat. Sehingga, penulis menyimpulkan Tempo.co ingin mengingatkan dan menyajikan pemberitaan kebijakan ini sangat penting dan memiliki dampak yang besar.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti mengenai pembingkaiannya berita atau analisis *framing* yang dibuat oleh Tempo.co dalam pemberitaan efisiensi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) era Prabowo pada bulan Februari 2025, maka penulis dapat menarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada elemen *problem identification* (pendefinisian masalah), terlihat bahwa Tempo.co ingin menekankan bahwa kebijakan ini dianggap tidak efektif dan memberikan dampak besar bagi divisi di Kementerian atau Lembaga (K/L).
2. Pada elemen *diagnose causes* (sumber masalah) tampaknya Tempo.co ingin menunjukkan bahwa sumber dari permasalahan tersebut yaitu adanya kebijakan melalui Instruksi Presiden yang seharusnya lebih dipertimbangkan kembali.
3. Pada elemen *make moral judgement* (membuat keputusan moral) terlihat bahwa Tempo.co ingin menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah bertujuan baik kepada anak-anak, ibu hamil di Indonesia dengan adanya program unggulan ini.
4. Pada elemen *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian), terlihat bahwa Tempo.co memberikan saran bahwa pemerintah seharusnya lebih berhati-hati dalam pengalokasian anggaran dari efisiensi anggaran yang dilakukan. Selain itu, Tempo.co juga ingin memberikan saran bahwa pemerintah sebaiknya lebih selektif dalam memangkas anggaran terhadap Kementerian atau Lembaga (K/L).

Dari hasil analisis *framing* pada media Tempo.co dalam pemberitaan ini, terlihat bahwa Tempo.co memiliki sifat netral. Dimana Tempo.co hanya memaparkan dan menyajikan pemberitaan sesuai dengan yang ada di lapangan, lalu diunggah. Tempo.co berusaha menyampaikan kepada pembaca sesuai dengan fakta, bersikap netral, dan tidak memihak kepada pihak manapun.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Azzahra, A., & Shelamita. (2023). *Framing berita kebijakan pemerintah tentang perdagangan minyak goreng di Kompas.com*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70581>
- Entman, R. N. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58.
- Haniah, U. (2024). *Analisis framing dugaan kecurangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2024*.
- Maulana, H., & Triyono, L. (2021). Framing Tempo.co terhadap program makan bergizi gratis (MBG): Analisis model Pan & Kosicki pada isu pemangkasan anggaran. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 167–186.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Melati, R. S. (2024). Framing identitas keluarga alternatif (families of choice) dalam film *Ali & Ratu-Ratu Queens*. *JDPS: Jurnal Diskursus Pendidikan Sosiologi*, 5(2). <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jdps/article/view/49191/18872>
- Wati, N. L. (2017). Program wajib belajar di Surabaya tahun 1984–1985 dalam pemberitaan media massa cetak. *Jurnal Pendidikan*, 5(3), 463–474.
- Nurmala, D., & Setiawan, H. (2022). Analisis framing pemberitaan membuka kemasan ilegal motor Ducati pada media daring CNNIndonesia.com dan Detiksport.com. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 2422–2426. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3291>
- Permadi, D., Muyassaroh, I. S., Purnaweni, H., & Widodo, A. S. (2024). Media massa dan konstruksi realitas: Analisis framing terhadap pemberitaan UU IKN pada media online Tempo.co dan MediaIndonesia.com. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 22(1), 1–15. <https://doi.org/10.31315/jik.v22i1.7754>
- Putriyeki, A., Sulistiawati, D., Khairani, N., Rizky, R., & Kusuma, A. (2025). Analisis multidimensional sentimen masyarakat terhadap program makan bergizi gratis pada media sosial X. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(1), 1004–1024. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/142>
- Samosir, H. E., Azhar, A. A., & Akbar, F. (2018). Analisis framing berita vonis kasus penistaan agama di media online Republika.co.id dan Detik.com. *Al-Balagh: Jurnal Komunikasi Islam*, 2(2), 231–248.
- Sazali, H. (2025). Formulasi regulasi dan kebijakan komunikasi dalam pelaksanaan program pembangunan: Studi pada program makan bergizi gratis. *Jurnal Komunikasi*, 6(3), 1670–1679.
- Tempo.co. (2025). Respons gelombang demo mahasiswa tolak efisiensi anggaran, Mensesneg minta mahasiswa lebih jeli. <https://www.tempo.co/politik/respons-gelombang-demo-mahasiswa-tolak-efisiensi-anggaran-mensesneg-minta-mahasiswa-lebih-jeli-1208944>